

### BAB III

## STRATEGI ELIT BIROKRASI DAN ORGANISASI DALAM MENYESUAIKAN REGULASI INDONESIA-VIETNAM DI BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF

Pada bab III ini akan membahas mengenai strategi *Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration* dan *Developmental States and Civil Society*, di mana pada bab ini akan memfokuskan bagaimana proses strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaganya untuk dapat mengatasi hambatan ekspor mobil ke Vietnam. Serta bagaimana birokrasi yang berjalan dibawah oleh salah satu koordinator dalam meningkatkan industri otomotif. Penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tanpa perlu mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat, di sisi lain peran masyarakat dalam kasus ini sangatlah minim bahkan hampir tidak ada, selain itu pada bab ini akan menjelaskan aktor non-negara siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

#### 1.1 *The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration*

Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, hadirnya elit birokrasi yang membantu pemerintah untuk menjalankan dan mengawasi suatu pasar agar mampu mengatur perekonomian sehingga pemerintah juga dapat

memfasilitasi pasar yang dilakukan oleh aktor swasta dalam memodernisasi negara. Untuk menopang peningkatan di industri otomotif, kementerian perindustrian merupakan pihak yang mengelola seluruh sektor yang berhubungan dengan industri. Selain itu dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam, kementerian perindustrian selaku pihak yang bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian lainnya untuk memecahkan masalah dan menjadi koordinator untuk membuat kebijakan dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam.

- **Peran kementerian perindustrian dalam menjalankan dan mengawasi strategi *Developmental State***

*Economic Bureaucracy* menjelaskan bagaimana birokrasi yang berjalan dibawah salah satu lembaga untuk dapat membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian pasar, di mana nantinya lembaga tersebut akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatur strategi dan mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan ekonomi.

1. Menteri perindustrian

keterlibatan lembaga dalam pertumbuhan ekonomi negara merupakan salah satu aktor yang penting dalam mengatur pihak-pihak lain untuk mengelola dan bertanggung jawab membantu pemerintah terhadap sektor industrinya. Untuk dapat melakukan pengembangan dalam memproduksi

industri otomotif Indonesia perlu adanya konsistensi yang jelas serta mempelajari ilmu yang mendalam agar mampu meningkatkan ekonomi dan kemajuan terhadap industri otomotif itu sendiri. Hal ini juga akan menggambarkan bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan strateginya untuk menjalin hubungan antar negara seperti dalam hal transfer teknologi yang di bantu oleh menteri-menterinya dalam melakukan birokrasi dan membuktikan peranan mereka untuk kemajuan teknologi di industri otomotif (Chalmers, Jobhaar, & Arini, 1996, pp. 126-128).

kementerian perindustrian merupakan lembaga yang mengoordinasi menteri-menteri lainnya dalam meningkatkan industri otomotif. Di mana dalam hal ini Kebijakan yang dikeluarkan kementerian perindustrian merupakan kebijakan yang paling penting karena dalam industri otomotif melakukan aktivitas langsung untuk memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kualitas bahan baku dari dalam negeri dan meningkatkan kapabilitas pabrik agar menghasilkan produk yang berkualitas serta mengurangi impor (Dewayana, Sugiarto, & Hetharia, 2012, p. 5).

Kementerian perindustrian dalam meningkatkan ekspor serta daya saing yang kuat mengembangkan industri komponen dalam negeri (TKDN) dan sektor industri kecil-menengah (IKM) untuk menyiapkan komponen sehingga menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global. Kemenperin juga membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan seperti peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait PPnBM agar dapat meningkatkan

ekspor otomotif dalam memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Kementerian perindustrian memberlakukan peraturan baru untuk meningkatkan investasi dan peningkatan produksi yang mencakup hemat bahan bakar, ramah lingkungan, harga yang terjangkau, dan dari segi keamanannya, di mana kemenperin melakukan regulasi baru terhadap peraturan menteri perindustrian Nomor 59 Tahun 2010. Di sisi lain kemenperin juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti SMK dan universitas dalam program pendidikan vokasi industri, serta membuat kegiatan dalam menyiapkan tenaga kerja industri tersertifikasi sebanyak 1.040.552 orang pada periode 2017-2019 untuk dapat mempercepat implementasi industri 4.0. yang strategis serta terintegrasi (Satya, 2018, pp. 21-23).

Untuk mendorong tercapainya program industri 4.0. kemenperin merealisasikan industri otomotif untuk bisa membuat manufaktur otomotif yang rendah emisi seperti kendaraan LCEV (Low Carbon Emission Vehicle), LCGC (Low Cost Green Car) dan membantu pemerintah dalam menyiapkan pengembangan industri otomotif dengan berbagai fasilitas dan insentif seperti menerapkan digitalisasi untuk mendukung perkembangan teknologi sehingga dapat mencapai target dengan memproduksi 1,5 juta unit mobil pada tahun 2020 dan kendaraan berbasis energi listrik yang di targetkan pada tahun 2025.

Manufaktur terkait industri otomotif sangat mempengaruhi kualitas pabrikan mobil buatan Indonesia sehingga perlunya peningkatan terkait standarisasi, SDM & produktivitas, pelatihan manajemen, pengembangan produk teknologi

& inovasi, magang, dan *workshop*, serta keterampilan teknis sehingga nantinya peluang dan prospek untuk menjadi basis produksi dalam komponen otomotif Indonesia mampu menguasai pasar ASEAN (Hendra S, 2017, pp. 40-48).

Banyaknya kebutuhan yang perlu di siapkan untuk dapat meningkatkan industri otomotif dalam membuat teknologi digital yang terus berkembang hingga sekarang, kementerian perindustrian selalu berkomitmen untuk menciptakan SDM yang mampu bersaing dan berinovasi. Langkah-langkah kementerian perindustrian untuk dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan masyarakatnya yang kuat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti negara Swiss dalam menjalin kerja sama terkait pendidikan vokasi industri yang bernama S4C (The Skill For Competitiveness), dalam kerja sama tersebut pemerintah Swiss memberikan bantuan senilai Rp 110 miliar dan bantuan pelatihan untuk kementerian riset, teknologi, sekolah vokasi kementerian perindustrian, pendidikan, serta SMK dan politeknik, dalam aktivitas perkuliahan, penambahan kurikulum, pelatihan dalam praktik dan teori, terkait teknik robotik, ototronik, audio dan video yang sangat dibutuhkan dalam industri otomotif Indonesia sehingga nantinya mampu memperluas lapangan pekerjaan, dan pasar global (Reistekdikti, 2018).

Kementerian perindustrian juga menjembatani pemerintah dalam melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam yang sempat terhambat oleh kebijakan baru yang dikeluarkan pada 1 Januari 2018 terkait *Decree*

*No.116/2017 dan Circular No.03/2018*, di mana industri otomotif Indonesia khususnya mobil bertipe CBU menghentikan penjualan terkait perizinan untuk pasar Vietnam karena adanya perbedaan persyaratan standar VTA Vietnam dengan standar SNI milik Indonesia. Kementerian perindustrian harus bisa melindungi industri otomotif dan menjadi koordinator bagi menteri-menteri lainnya guna menjaga pasar domestik, dan membahas tentang persyaratan dan sertifikasi yang harus sesuai dengan VTA Vietnam sehingga ekspor otomotif berjalan normal kembali (Hamdani, 2018).

## 2. Kementerian Perdagangan

Kementerian perdagangan merupakan salah satu aktor yang membantu pemerintah dalam melakukan perdagangan domestik maupun internasional untuk sektor industri salah satunya adalah industri otomotif. Fokus dari kementerian perdagangan adalah untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pemasukan ekonomi, arus barang ekspor-impor, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kementerian perdagangan juga memberikan dukungan kepada BSN, DPP, dalam mengatur standar produk Indonesia menjadi standar internasional untuk dapat bersaing dengan produk-produk negara lain.

Kementerian perdagangan mengatur regulasi yang dapat sejalan dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan menambah pendapatan PDB negara tentunya dengan keterlibatan lembaga-lembaga lainnya. Kementerian perdagangan selaku aktor yang melakukan kerja sama perdagangan domestik

dan internasional dalam menjalankan perannya mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri untuk menjaga kestabilan dalam lingkup eksternalnya terlebih lagi dalam ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor (Ratnaningsih, 2015, pp. 63-64).

Kementerian perdagangan Republik Indonesia terhadap bidang otomotif khususnya mobil merupakan bidang industri yang permintaan di pasar domestik maupun luar negeri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Perdagangan memiliki tugas dalam mengamankan perdagangan Indonesia agar ekspor produk Indonesia terus terbuka ke negara lain, hal ini tertuang dalam UU No. 7 tahun 2014. Kementerian perdagangan juga berperan dalam memposisikan Indonesia untuk bernegosiasi, diplomasi, dalam forum regional, maupun bilateral, dimana artinya hal ini mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sosial. (Arifin, Supriyanto, Kusnadi, Repa, & Lamria, 2018, pp. 7-17).

Untuk kelancaran ekonomi, kementerian perdagangan membantu dalam memfasilitasi pasar melalui strategi yang dikeluarkan untuk memperbesar dan melindungi industri-industri yang terkait. Dari industri otomotif dari tahun 2014-2018 banyak mengalami peningkatan meskipun awal tahun 2018 mengalami kendala ekspor mobil ke Vietnam. Tercatat sejak tahun 2014 jumlah ekspor mobil bertipe CBU mencapai sekitar 202,3 ribu unit, 2015 mencapai 207,7 ribu unit, 2016 mengalami penurunan mencapai 194,4 ribu unit, 2017

mencapai 231,2 ribu unit, 2018 264,6 ribu unit (Katadata, 2019). Kementerian perdagangan dalam membantu industri otomotif Indonesia guna memperlancar ekspor mobil ke Vietnam dibantu oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut, terlebih lagi kementerian perdagangan membuat peraturan yang memudahkan negara-negara lain dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia dan mengembangkan perdagangan internasional untuk memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan perekonomian dunia (kemendag, 2019).

Dalam peraturan baru yang telah di keluarkan oleh pemerintah Vietnam mengenai persyaratan perakitan, manufaktur, impor kendaraan serta jaminan perdagangan jasa dan pemeliharaan motor, serta keamanan teknis dan lingkungan, Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah memberikan konsultasi teknis terhadap pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses regulasi terkait aktivitas ekspor mobil Indonesia yang sempat mengalami kendala terkait perizinan dan segera di pulihkan dan kembali terbuka. (Primadhyta, 2018).

### 3. Menteri Perhubungan

Menteri perhubungan juga merupakan pengakses jalur untuk kelancaran ekonomi negara. Menteri perhubungan membuat tol laut dan udara agar memudahkan transportasi logistik dan menurunkan komoditas. Hal tersebut juga bertujuan agar masyarakat dan roda pemerintahan terus berjalan dan stabil



sehingga memudahkan perdagangan, ekonomi, dan industri-industri lainnya termasuk ekspor dan impor (perhubungan, 2019). Dengan adanya infrastruktur yang memadai wilayah-wilayah terpencil akan mudah dicapai dan membuat masyarakat serta bisnis-bisnis yang ada di Indonesia semakin berkembang. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) agar meningkatkan kemampuan negara dalam menyediakan sarana/prasarana yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Dalam meningkatkan nilai ekspor, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak, dalam menguatkan kerja sama antara pelaku usaha, pelabuhan, maupun menteri yang terkait perlu adanya sinkronisasi terkait komoditi jadwal, ruangan kapal, dan muatan dan menggunakan asuransi dari Indonesia maupun angkutan laut Indonesia sehingga pelaku bisnis yang ada di Indonesia dapat bersaing secara kondusif. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan ekspor (Publik, 2018).

Kementerian perhubungan dalam kasus terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam memiliki peran dalam mendukung industri otomotif seperti melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam dengan cara menjelaskan bagaimana proses uji emisi dan teknologi yang dimiliki Indonesia melalui data-data untuk uji tipe kendaraan yang ada di Indonesia yang telah

memiliki sertifikasi internasional dalam keselamatan dan emisi, (Supriyanto, 2018).

#### 4. GAIKINDO

Kementerian perindustrian juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti GAIKINDO dalam membantu pemerintah dalam penjualan otomotif domestik dan luar negeri untuk kebutuhan ekonomi negara. Dalam bidang ekspor, Indonesia dibantu oleh GAIKINDO untuk meningkatkan pasar ekspor khususnya mobil, di mana GAIKINDO juga dapat mengatur permasalahan yang terkait hambatan ekspor mobil dengan negara Vietnam untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam agar masalah yang dihadapi akan segera teratasi dan *volume* mobil yang akan di ekspor ke Vietnam tidak menurun yang diperkirakan kehilangan ekspor 20% dari total 50 ribu unit mobil yang dikirim ke Vietnam. (Reily & Ekarina, 2018).

GAIKINDO sendiri cukup aktif dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan dengan kemampuan industri otomotifnya yang semakin kompetitif dan struktur manufakturnya semakin banyak.

GAIKINDO membantu pemerintah dalam berbagai hal untuk membantu negara agar dapat bersaing di pasar global khususnya persaingan di Asia Tenggara yang semakin besar, hal ini menggambarkan bagaimana komunikasi dan kerja sama yang terjalin hingga saat ini semakin baik. GAIKINDO juga membantu pemerintah dalam penjualan mobil buatan Indonesia ke beberapa

negara seperti Vietnam, Myanmar, Laos, Bangladesh, Qatar, Peru, Bahrain (Gaikindo, 2018)

GAIKINDO memiliki peran yang positif untuk pertumbuhan ekonomi negara dalam bidang otomotif khususnya mobil dengan cara meningkatkan ekspor serta memfokuskan dalam membuat mobil SUV (Sport Utility Vehicle) dan sedan, karena hingga saat ini Indonesia dalam industri otomotifnya hanya berfokus dalam pembuatan mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) (Rudi & Ferdian, 2018). Banyaknya investasi yang mendukung industri otomotif di Indonesia memberikan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produk buatan Indonesia seperti pabrik mesin dan pabrikan komponen, dan peningkatan SDM & penguasaan teknologi, serta manajemen industri otomotif (Julianto, 2016). Untuk dapat menjadi industri otomotif yang mampu bersaing di ASEAN, dalam memproduksi mobil Indonesia harus mampu memvariasikan produknya untuk dapat menarik minat pasar global.

#### 5. Kementerian Luar Negeri

Dalam melakukan diplomasi Kementerian Luar Negeri sangat dibutuhkan untuk menyambung hubungan yang dilakukan pemerintah. Hal ini juga memudahkan pemerintah untuk memberikan peran strategis untuk melakukan pembangunan ekonomi di berbagai negara dan memudahkan perdagangan luar negeri. Kemenlu juga berada pada posisi garda terdepan untuk membantu negaranya dalam menyelesaikan masalah maupun promosi

ekspor dan investasi (Kurniawan A. , 2014, pp. 257-259). Kemenlu menggunakan pendekatan dengan cara berdiplomasi untuk melancarkan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga tujuan nasionalnya tercapai, di mana kemenlu membantu diplomasi antara negara-negara, perusahaan-perusahaan, maupun negara-perusahaan untuk melakukan diplomasi ekonomi terkait barang, jasa, produksi, tenaga kerja, dan investasi (Suropati, Montratama, & Sulaiman, 2018, pp. 232-237).

Peran Kemenlu dalam mengatasi hambatan ekspor mobil ke Vietnam adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia sebagai mediator dalam menjalankan industri otomotif, Kemenlu yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri lainnya serta pihak swasta yaitu GAIKINDO memiliki hubungan internal yang sangat baik sehingga mampu membantu pemerintah dalam melancarkan kebijakannya. Terlihat bagaimana Kemenlu mampu melakukan diplomasi dan negosiasi terhadap pemerintah Vietnam yang akan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara terkait regulasi *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018*, Kemenlu juga bertugas agar dapat mengawasi dan membuka hambatan akses pasar ekspor mobil karena Vietnam sendiri merupakan pasar ekspor mobil yang paling utama bagi Indonesia.

Pada tahun 2019 Duta Besar RI Hanoi yaitu Ibnu Hadi mengharapkan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat menembus USD 600 juta sebab dari

tahun ke tahun kerja sama Indonesia-Vietnam selalu mendapatkan tren positif, pada periode Januari-April 2019 Indonesia sudah mampu mengekspor mobil sebanyak 12.723 unit senilai USD 190 juta, kerja sama Indonesia-Vietnam tersebut memberikan kenaikan perdagangan terhadap industri otomotif dalam memasok suku cadang dan komponen otomotif. Untuk dapat terus mendorong kerja sama antara Indonesia-Vietnam kedubes RI selalu menjalankan komunikasi dengan otoritas Vietnam untuk terus menjaga hubungan baik dan terus mendorong kenaikan investasi maupun kerja sama terhadap perusahaan di bidang industri otomotif (Kemlu, 2019).

Dengan demikian, adanya koordinasi dari pemerintah terhadap menteri dan pihak swasta yaitu GAIKINDO memudahkan jalannya birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dalam menjalankan, mengatur maupun menentukan arah kebijakan terhadap industri otomotif Indonesia. Birokrasi yang berjalan melalui lembaga-lembaga tersebut mampu melakukan kerja sama dalam menunjang perekonomian dan memfasilitasi pasar dan membantu negara dalam memodernisasi Industri-industri terkait sehingga mampu bersaing di pasar global.

Kementerian perindustrian berperan dan mengontrol industri otomotif untuk memperlancar produktivitas serta meningkatkan teknologi dan menjual ke dalam pasar domestik maupun luar negeri. Selain itu, dengan ikut sertanya peran pemerintah bersama dengan menteri dan pihak swasta mampu menarik

investor asing agar dapat mengembangkan ekonomi Indonesia dan dapat bersaing di dunia internasional, sehingga dapat meningkatkan percepatan arus ekonomi. Kemudian melihat strategi presiden Joko Widodo dalam mengembangkan ekonomi Indonesia tidak hanya dilihat dari satu sisi melainkan di berbagai bidang seperti infrastruktur yang memadai dan revolusi di bidang Industri sehingga hal ini membuat akses roda ekonomi negara dan masyarakat dapat meningkatkan penjualan di Indonesia.

Keterkaitan antara pemerintah dengan kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan, GAIKINDO, dan kemenlu mampu menentukan arah dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam melalui bidangnya masing-masing, hal ini menjelaskan bagaimana terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dengan kementerian serta organisasi dalam memajukan industri otomotif nasional. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi di dalam birokrasi yang berjalan sudah terkoordinasi dengan baik untuk memajukan industri otomotif nasional dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

### ***3.2 Developmental States and Civil Society***

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih melibatkan aktor-aktor yang berada dalam industri otomotif seperti pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dalam distribusi, dan promosi. Sehingga membuat masyarakat tidak memiliki peran

yang signifikan untuk membantu pemerintah bahkan untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan, masyarakat di tujukan hanya untuk menikmati pasar yang diberikan. Partisipasi masyarakat terkait kasus ini mengidentifikasi bahwa proses yang di jalankan oleh pemerintah sangatlah minim karena tidak memiliki kekuatan untuk membantu pemerintah dalam keterlibatannya di pasar global.

Perkembangan pembangunan negara tidak lepas dari konteks sosial-ekonomi antara pemerintah dan masyarakat sipil, sebab masyarakat banyak memberikan tuntutan-tuntutan untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Melihat bagaimana negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi tentunya tidak terelakan bahwa masyarakat turut serta dalam membantu pemerintah untuk dapat memodernisasi negaranya, namun pemerintah dalam meningkatkan ekonominya tidak mampu membangun ekonomi sendiriaan sehingga perlu adanya bantuan seperti sektor swasta dan menimbulkan kekuatan sosial-politik dalam memfasilitasi pemerintah (Budiman, 2006, pp. 3-8).

Partisipasi masyarakat terkait kasus ini mengidentifikasi bahwa proses yang di jalankan oleh pemerintah sangatlah minim bahkan bisa dikatakan tidak ada sebab kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih memilih menteri-menteri yang terkait dan organisasi yang terjun langsung seperti GAIKINDO dalam meningkatkan ekonomi khususnya terhadap industri otomotif. Rancangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mengarah kepada kebutuhan industri otomotif sehingga masyarakat umum tidak dapat berpartisipasi dalam

merancang kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa setiap pembuatan kebijakan selalu terpusat pada pemerintah namun nantinya dari kebutuhan industri otomotif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

GAIKINDO merupakan organisasi swasta yang memfasilitasi pemerintah dalam manufaktur industri otomotif dari komponen hingga produsen, GAIKINDO merupakan organisasi yang sangat berpengaruh bagi Indonesia sehingga pemerintah terus meningkatkan hubungan guna langkah dalam membangun industri nasionalnya. Pemerintah mempercayai GAIKINDO dalam melakukan distribusi, promosi, maupun pengembangan industri otomotif. GAIKINDO sangat berperan aktif bagi pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan maupun program yang sesuai untuk kedepannya (Atmoko, 2016). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, GAIKINDO menyelenggarakan acara GIIAS yang berlangsung setiap tahun, acara tersebut memberikan masyarakat pengetahuan dalam perkembangan teknologi dunia yang diaplikasikan kedalam kendaraan bermotor (Satriawan & Yuliana S.T., M.S.M., 2016, pp. 2961-2967).

Dengan demikian, GAIKINDO memberikan nasihat untuk pemerintah dalam merancang strategi terhadap kebijakan yang ada di dalam pasar global untuk memenuhi kebutuhan negara khususnya di dalam industri otomotif. Selain itu elit birokrasi yang berhubungan dengan pemerintah di mana masing-masing aktor



memiliki pengurus yang bekerja dalam bidangnya untuk melakukan peningkatan produksi, penjualan, ekspor-impor, dan investasi terkait isu maupun persaingan tanpa keterlibatan masyarakat. Sebab masyarakat sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membantu pemerintah dalam keterlibatannya di pasar global sehingga masyarakat umum hanya bisa menerima hasil dari kesepakatan pemerintah dengan elit birokrasi beserta pihak swasta tersebut tanpa memiliki peran yang jelas.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam produksi, riset dan komponen di Indonesia sangat berpengaruh bagi pemerintah untuk dapat memberikan masyarakat umum kekuatan baru dan pendidikan yang tinggi guna menciptakan negeri yang maju dengan segala aspek yang mencakup teknologi dan pengetahuan yang dapat dirancang untuk Indonesia kedepannya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dikeluarkannya kebijakan terkait industri 4.0. mempengaruhi semua kalangan dalam mengkonstruksi pembangunan guna meningkatkan ekonomi dan kekuatan Indonesia khususnya terhadap masyarakat yang lebih baik.

Peran GAIKINDO dalam kasus ini tidak memiliki peran yang lebih seperti dalam membuat kebijakan, namun GAIKINDO hanya memiliki peran dalam memberi nasihat, memberikan arahan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kondisi industri otomotif. Selain itu peran masyarakat yang sangat minim dalam mengikuti perkembangan dan isu terkait industri otomotif ditutupi oleh elit birokrasi yang lebih di percayai pemerintah guna

merumuskan strategi kebijakan industri otomotif di pasar global karena kurangnya *power* masyarakat terkait kebutuhan industri otomotif. Pemerintah dan elit birokrasinya dalam mengkontruksi pembangunan lebih memfokuskan kegiatan yang lebih dominan terhadap sektor yang ingin dikembangkan di mana dari kedekatan pemerintah dan aktor yang terkait mampu memberi masukan, meningkatkan komponen industri, penjualan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi domestik, serta melakukan kegiatan pengembangan dan penelitian dalam memproduksi mobil global yang lebih optimal dan pembangunan dapat berjalan lebih fokus.

Hadirnya GAIKINDO mampu membuat *civil society* menerima hasil dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan elit birokrasinya untuk kemajuan teknologi dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah beserta elit birokrasi yang di percayai mengasumsikan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya tidak diperhatikan dalam dunia industri otomotif.

Dengan demikian, Kerja sama dan terjalinya komunikasi yang baik antara pemerintah beserta TIM DELRI (Delegasi Republik Indonesia) yaitu kementerian luar negeri, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri perhubungan dan GAIKINDO terkait diplomasi dengan otoritas Vietnam untuk melancarkan kembali ekspor mobil mendapatkan hasil yang positif berkat adanya negosiasi yang sama-sama menguntungkan untuk ke dua negara. Di

mana Indonesia melakukan pemulihan aturan dan menyetujui bagaimana persyaratan aturan Vietnam terhadap *Vehicle Type Approval* (VTA) yang harus mengikuti persyaratan dari uji tipe, dan kelayakan untuk mobil bertipe *Completely Build Up* (CBU) dan hanya melakukan penyesuaian dan penambahan informasi data dengan VTA milik Vietnam, sebab Indonesia sendiri sudah memiliki teknologi yang modern dan mesin yang sudah mencukupi terkait standar gas buang Euro 4.

